



ABSTRAK

Upaya pencegahan penyakit menular pada masa Orde Baru berhasil membawa hasil yaitu Indonesia dinyatakan bebas cacar oleh WHO pada tahun 1974. Hal tersebut merupakan pencapaian luar biasa mengingat bahwa fasilitas informasi seperti TV, radio, maupun surat kabar masih sangat terbatas dan sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah Orde Baru memanfaatkan metode penyampaian informasi lain untuk menyebarkan informasi imunisasi yaitu penyuluhan melalui para tenaga kesehatan, yang dalam praktiknya dibantu oleh warga sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Menyadari potensi tersebut, pemerintah mengadaptasi keterlibatan warga sipil dalam menyebarkan informasi ke tingkat nasional yaitu program Lintas Sektoral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan strategi pemerintah dalam melaksanakan penyuluhan imunisasi sejak tahun 1968. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari tahapan: pemilihan topik; heuristik; verifikasi; interpretasi; kemudian historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah konsep penyuluhan imunisasi di Indonesia mulai berkembang saat adanya pelaksanaan Smallpox Eradication Program pada tahun 1968 – 1974 dan setelah menyadari potensi metode penyuluhan, pemerintah mengangkat potensi tersebut ke tingkat nasional dengan program Lintas Sektoral. Penyuluhan imunisasi dilaksanakan oleh pihak tenaga kesehatan maupun warga sipil yang telah dipilih atau mengajukan diri dan mendapatkan pelatihan oleh para tenaga kesehatan di daerahnya masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan imunisasi dapat berupa faktor kebudayaan dimana masyarakat lebih mempercayai pengobatan tradisional yang sudah ada sejak dulu, keberadaan fasilitas kesehatan di area tinggal penduduk serta ekonomi keluarga baik bagi masyarakat maupun para penyuluhan imunisasi itu sendiri.

Kata Kunci: imunisasi, kesehatan masyarakat, penyuluhan, perkembangan kesehatan.



ABSTRACT

Efforts to prevent infectious diseases during the New Order era succeeded in producing results, namely Indonesia was declared smallpox-free by WHO in 1974. This was an extraordinary achievement considering that information facilities such as TV, radio and newspapers were still very limited and highly concentrated on the island of Java. The New Order government utilized other information delivery methods to disseminate immunization information, namely counseling through health workers, who in practice were assisted by civilians in carrying out their duties. Realizing this potential, the government adapted the involvement of civilians in spreading information to the national level, namely the Lintas Sektoral program. This research aims to determine the development of the government's strategy in implementing immunization counseling since 1968. This research uses historical research methods which consist of stages: topic selection; heuristics; verification; interpretation; then historiography. The results of this research are that the concept of immunization counseling in Indonesia began to develop when the Smallpox Eradication Program was implemented in 1968 - 1974 and after realizing the potential of the counseling method, the government raised this potential to the national level with the Lintas Sektoral program. Immunization education is carried out by health workers and civilians who have been selected or volunteered and received training by health workers in their respective regions. Factors that influence the implementation of immunization counseling include cultural factors where people trust traditional medicine that has existed for a long time, the existence of health facilities in the area where the population lives and the family economy for both the community and the immunization instructors themselves.

Key Words: counseling, health development, immunization, public health.